



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10) dan untuk melaksanakan perubahan kebijakan dan strategi pemerintah serta menyesuaikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah maka perlu menetapkan kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen Perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah rancangan Perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD ini menjadi pedoman Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 serta menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target sasaran pembangunan Daerah;
 - c. prioritas pembangunan Daerah; dan
 - d. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) Penjabaran RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

BAB VI : PENUTUP.

- (2) Penjabaran RKPD Tahun 2019 termuat dalam Dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 Juli 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 17 Juli 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

I GUSTI NYOMAN YUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 38

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 37 TAHUN 2019
TANGGAL : 17 JULI 2019

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI BANJAR	1
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR.....	9
BAB 1	10
PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang.....	10
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	11
1.3. Sistematika Penyusunan	13
1.4. Maksud dan Tujuan	13
1.4.1. Maksud	13
1.4.2. Tujuan.....	13
BAB 2	14
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019.....	14
BAB 3	31
KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	31
3.1. Dasar Pertimbangan Perubahan.....	31
3.1.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	31
3.1.2. Perubahan Asumsi Kebijakan Keuangan Daerah	31
BAB 4	36
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	36
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar.....	36
4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan 2019	38
- Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019	38
- Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019.....	39
- Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten banjar tahun 2019	39
BAB 5	102
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	102
BAB 6	185
PENUTUP	185
Lampiran	

DAFTAR TEBEL

Tabel 2. 1.	Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil Rkpd Kabupaten Banjar Triwulan Ii Tahun 2019.....	15
Tabel 3. 1.	Proyeksi/target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun 2019	34
Tabel 4. 1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021	37
Tabel 4. 2.	Sinkronisasi Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP Tahun 2019.....	39
Tabel 4. 3.	Keselarasan Indikator Makro antara RKP, RKPD Prov. Kalsel dan RKPD Kab. Banjar	40
Tabel 4. 4.	Rumusan Prioritas, sasaran dan program Kabupaten Banjar Tahun 2019	43
Tabel 5. 1.	Rekapitulasi perubahan Program dan kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2019	103
Tabel 5. 2.	Rekapitulasi Perubahan Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1.	Proporsi Capaian Fisik Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2019.....	29
Gambar 2. 2.	Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahu 2019	29

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD Tahun 2019 berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Banjar. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional. RKPD menjamin konsistensi capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Dokumen perencanaan tahunan ini mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Tahun 2019. RKPD Tahun 2019 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD Tahun 2019.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Dalam pelaksanaan anggaran, disadari bahwa perubahan kebijakan anggaran pemerintah Tahun 2019 berdampak secara langsung terhadap APBD Tahun 2019, sementara kinerja pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2018 secara tidak langsung berdampak terhadap APBD Tahun anggaran 2019, demikian pula dengan kinerja masing-masing SKPD terhadap pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Menyikapi proyeksi perubahan-perubahan baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun berjalan perlu disesuaikan dengan amanah RPJMD dan mengakomodir RKP Tahun 2019. Terlebih lagi setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yang mengamanatkan pengalokasian anggaran yang berasal dari APBD untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dimana pada APBD murni Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Banjar belum mengalokasikan anggaran sesuai dengan amanat peraturan di atas.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019, yang meliputi : penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang mendesak serta adanya penyesuaian beberapa program/kegiatan, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap perencanaan program kegiatan dan penganggaran daerah.

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 343 bahwa perubahan RKPD dan Renja SKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

- 2) dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Keadaan yang melatarbelakangi perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2019 meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2019 mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73)
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 19. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
 20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 03);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10).
31. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019

1.3. Sistematika Penyusunan

Perubahan RKPD Kabupaten Banjar tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB 1 PENDAHULUAN
- BAB 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018
- BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB 6 PENUTUP

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk :

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum perubahan APBD (KUPA), serta penentuan perubahan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS-Sementara) Tahun 2019
2. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2019.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2019 adalah untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Pengalokasian sumber daya berdasarkan hasil pencapaian indikator kinerja pelaksanaan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2019 sampai triwulan II.

BAB 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019

Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II pada tahun 2019 bertujuan untuk:

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah,
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan,
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan,
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan,
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD,
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan I pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1. FORMULIR KESIMPULAN EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN BANJAR TRIWULAN II TAHUN 2019

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	34,42	30,31	Sedang	Rendah	(1). Ada beberapa penamaan nomenklatur yang berbeda sehingga menunggu pergeseran (2) . Jadwal pengadaan diklat harus menyesuaikan skedul Badan diklat (3). Beberapa kegiatan tergantung instansi lain (4). Beberapa jabatan struktural masih belum terisi termasuk jabatan Kepala Badan	Fasilitas memadai, koordinasi rutin dilaksanakan
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	26,33	25,18	Rendah	Rendah	Kinerja SDM belum maksimal dan optimal dikarenakan kompetensi yang masih rendah. Selain itu terdapat juga adanya kegiatan yang tumpang tindih dengan instansi vertikal sehingga sering menimbulkan keraguan dalam mengambil keputusan	Komitmen yang tinggi dari pemangku kepentingan dan jajaran untuk mencapai target pekerjaan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24,24	18,88	Sangat Rendah	Sangat Rendah	hampir seluruh kabupaten Banjar merupakan wilayah rawan bencana, wilayah kab. Banjar luas	adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, aparatur penanggulangan bencana yang terlatih, peralatan penanggulangan bencana yang cukup memadai
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	43,77	34,59	Tinggi	Sedang	1. Kepatuhan dalam membayar pajak daerah masih rendah sehingga mempengaruhi capaian pajak daerah secara keseluruhan.	1. Koordinasi dan komunikasi dengan Sub Bag perencanaan Bapenda terbilang cukup nyaman dan cepat tanggap.

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
						2. Komitmen dalam pencapaian target retribusi daerah yang belum terlaksana dengan baik.	2. Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun .
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50,30	31,82	Sangat Tinggi	Rendah	(1). Sistem Pengelolaan Keuangan daerah yang belum Terintegrasi (2). Pengelolaan Aset daerah yang masih belum optimal	Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	45,44	20,45	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	- Belum optimalnya relevansi hasil perencanaan yang dilakukan. - Faktor lain yang menjadi penghambat adalah adanya kegiatan-kegiatan yang mengalami pergeseran sehingga menunggu penetapan.	1. Komitmen yang tinggi pimpinan dan jajaran untuk mencapai target kegiatan secara maksimal 2. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku 3. Fasilitas yang memadai
7	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	43,25	21,24	Tinggi	Sangat Rendah	Terdapat kegiatan yang menyerap anggaran terbesar yaitu Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah , Pembangunan sarana pariwisata (DAK) dan pelaksanaan festival pariwisata pada kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri belum terlaksana secara maksimal hingga bulan Mei 2019 Kegiatan festival budaya baru dilaksanakan 2 kegiatan dari 7 kegiatan. Puncak pelaksanaan kegiatan pada Agustus s.d Oktober.	

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
						Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK) belum terealisasi, salah satunya karena ada pergeseran anggaran.	
						Kegiatan festival pariwisata pada kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri di bidang pemasaran rencananya baru dilaksanakan Agustus dilanjutkan pada bulan berikutnya dan menjadi rangkaian dari acara HUT Kab. Banjar	
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	64,60	30,78	Sangat Tinggi	Rendah	(1). Kerusakan alat cetak e KTP dan tidak adanya Serah Terima alat cetak tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Banjar tidak bisa memperbaikinya, dan tentunya hal ini sangat berdampak pada pelayanan. (2). Kantor yang masih cukup kecil untuk menampung jumlah warga yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan.	1. Koordinasi dan komunikasi dengan Sub Bag perencanaan terbilang cukup nyaman dan cepat tanggap. 2. Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun . (3). Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
9	DINAS KESEHATAN	32,70	17,91	Sedang	Sangat Rendah	beberapa Kegiatan dengan pendanaan DAK terkendala karena masih belum ada pada e-katalog pelaksanaan Kegiatan dengan pendanaan DAK yang terkendala regulasi	Memaksimalkan SDM yang ada untuk bekerjasama menyelesaikan pekerjaan

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	61,46	25,15	Sangat Tinggi	Rendah	pencairan DAK tahap I masih dalam proses melengkapi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan	
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	49,65	32,51	Sangat Tinggi	Sedang	wilayah kabupaten banjar sangat luas, pemahaman SKPD terhadap indikator Teknologi informasi dan komunikasi masih terbatas	Sumber Daya Manusia yang memadai, kebutuhan teknologi informasi yang terus berkembang
12	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	33,13	28,96	Sedang	Rendah	beberapa Kegiatan yang pelaksanaannya mundur sehingga baru bisa dilaksanakan di bulan Juni karena kendala dalam merampungkan jadwal fasilitasi kemitraan bagi UM dengan UB dan belum ada penetapan SK Bupati	Percepatan pelaksanaan kegiatan
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20,80	17,66	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sarana dan prasarana yang kurang memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Banjar	komitmen pimpinan dan dukungan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18,09	4,10	Sangat Rendah	Sangat Rendah	keluarnya Peraturan Menteri PUPR Nomor : 07/PRT/M/2019 Tentang pengadaan jasa konstruksi yang tidak bersesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2016 tentang pengadaan barang jasa	Kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai dan dukungan dari mitra kerja
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	48,62	25,07	Sangat Tinggi	Rendah	Keterbatasan personil sehingga banyak yang rangkap tugas, hal ini menyebabkan kegiatan berjalan kurang optimal	Komitmen dari pemangku kepentingan dan jejaringan untuk mencapai target fisik dan

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
							keuangan sesuai dengan waktu yang direncanakan
16	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	44,05	31,62	Sangat Tinggi	Rendah	beberapa kegiatan mundur dari waktu yang direncanakan	telah dilakukan evaluasi kemajuan kegiatan secara berkala
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	30,08	36,41	Rendah	Sedang	-Lambatnya penyampaian laporan LKPM dari perusahaan	Meningkatnya minat investor
						- Ada kegiatan yang responnya kurang begitu baik dari masyarakat atau investor yaitu sosialisasi yang seharusnya 200 undangan tetapi dihadiri hanya 50%, padahal sosialisasi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau investor tentang pentingnya mendaftarkan izin bagi perusahaan mereka sehingga dapat meningkatkan nilai investasi di Kab. Banjar	SDM yang memadai, dan dukungan dari mitra kerja
18	DINAS PENDIDIKAN	13,83	19,43	Sangat Rendah	Sangat Rendah	- beberapa kegiatan dilaksanakan dengan proses e-purchasing, namun masih terkendala sistem pada LKPP	Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
						- beberapa kegiatan mundur dari waktu yang direncanakan	

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	37,98	20,72	Sedang	Sangat Rendah	- ketersediaan dana DAK pada Kas Daerah masih belum ada	kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
20	DINAS PERHUBUNGAN	37,24	42,93	Sedang	Tinggi	Kurang SDM Bidang Perhubungan, prasarana transportasi belum lengkap dan fasilitas penunjang prasarana perhubungan masih sederhana	semakin lengkapnya peralatan pengujian kendaraan bermotor dan adanya kegiatan uji keliling terhadap kendaraan wajib uji, dan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas semakin meningkat
21	DINAS PERIKANAN	50,78	24,95	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK sebesar 977.060.000 yang salur sekaligus belum bisa pencairan karena masih dalam proses lelang, sehingga berpengaruh nyata terhadap penyerapan anggaran yang hampir 1/3 dari pagu keseluruhan SKPD	
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	44,51	27,49	Sangat Tinggi	Rendah	- Kegiatan untuk di UPT LPSB belum terealisasi karena Kepala UPT belum ada yang mengisi sampai dengan bulai Mei 2019	
						- kegiatan terkait revitalisasi pasar, sedang dalam proses penyiapan lahan, dan sosialisasi kepada pedagang belum terlaksana	

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
						- Adanya pergeseran anggaran yang baru ditetapkan 27 Mei, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran	
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	23,27	15,98	Sangat Rendah	Sangat Rendah	pengadaan buku bahan pustaka masih terkendala, belum tersedia dalam e-katalog	kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
24	DINAS PERTANAHAN	28,35	24,29	Rendah	Sangat Rendah	kewenangan yang menjadi urusan dinas pertanahan masih terbatas	Tersedia sumber daya manusia yang kompeten
25	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	10,41	33,48	Sangat Rendah	Sedang	Penetapan pejabat pembuat komitmen yang terlambat karena pejabat yang membidang kegiatan tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang jasa	koordinasi baik internal maupun eksternal yang intensif dan dukungan penuh dari mitra kerja
26	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	52,44	26,39	Sangat Tinggi	Rendah	- Adanya beberapa Kegiatan mengalami pergeseran anggaran sehingga Kegiatan belum terlaksana karena menunggu penetapan pergeseran	
						- Adanya pergantian pejabat sehingga berdampak pada perubahan SK PPK, dan kegiatan menjadi tertunda	
						- Kegiatan yang didanai DAK belum ada pencairan, pencairan DAK tahap I masih dalam proses melengkapi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan	

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
27	DINAS SOSIAL	50,00	33,31	Sangat Tinggi	Sedang	SDM kurang memadai, beberapa Jabatan struktural masih belum terisi	Motivasi yang tinggi dari para personil untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya
28	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	35,46	34,14	Sedang	Sedang	1. ada perbup kita yang mengatur hibah harus diberikan kepada kelompok tani yang berbadan hukum dan waktu minimal 2 tahun sehingga kegiatan yang dilaksanakan hanya bisa pendampingan, monev dan sosialisasi	adanya kegiatan yang bersumber dari dana pusat dan provinsi.
						2. keterbatasan jumlah dan kompetensi sdm d seksi terkait kegiatan	
29	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	40,53	30,63	Tinggi	Rendah	Keterbatasan jumlah SDM di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sehingga pelaksanaan Kegiatan terhambat	
30	INSPEKTORAT DAERAH	37,29	66,67	Sedang	Sangat Tinggi	(1). Masih kurang maksimalnya Sistem Pengendalian Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	1. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
						(2). Masih kurangnya kompetensi dan kualifikasi Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	2. Koordinasi dan komunikasi dengan Sub Bag perencanaan terbilang cukup nyaman dan cepat tanggap.
31	RUMAH SAKIT UMUM RATU ZALECHA	55,60	29,35	Sangat Tinggi	Rendah	- kendala mekanisme pelaksanaan beberapa pengadaan barang/jasa belum tersedia di e-katalog	adanya batasan waktu penandatanganan kontrak pekerjaan yang didanai Dana

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
						- ketersediaan dana DAK pada Kas Daerah masih belum ada	Alokasi Khusus berdasarkan tahapan kontrak maupun realisasi keuangan yang harus dicapai oleh masing-masing satker penerima DAK
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	31,41	31,51	Rendah	Rendah	(1). Keterbatasan kemampuan SDM (2). terdapat beberapa kegiatan yang insidental dan kondisional sehingga berpengaruh pada optimalisasi realisasi fisik dan keuangan	Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
33	SEKRETARIAT DAERAH	41,72	33,03	Tinggi	Sedang	Kinerja SDM belum maksimal dan optimal dikarenakan kompetensi yang masih rendah. Disamping itu juga belum tercukupinya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang pekerjaan.	Komitmen yang tinggi dari pemangku kepentingan dan jajaran untuk mencapai target kegiatan secara memadai.
34	SEKRETARIAT DPRD	44,33	29,58	Sangat Tinggi	Rendah	Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya tidak tertata sesuai dengan mekanisme penganggaran yang sudah di atur. Disamping itu juga masih terdapat perbedaan pemahaman dalam mengartikan peraturan antara setwan dengan anggota dewan	Komitmen yang tinggi dari pemangku kepentingan dan jajaran untuk mencapai target fisik dan keuangan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Selain itu di dukung pula dengan fasilitas dan sarana pendukung kerja yang memadai.
35	KECAMATAN ALUH-ALUH	25,00	8,03	Sangat Rendah	Sangat Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
						tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	
						(2). Sarana dan prasarana kantor yang masih kurang memadai	
36	KECAMATAN ARANIO	26,93	26,93	Rendah	Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. (2). Sarana dan prasarana kantor yang masih kurang memadai	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
37	KECAMATAN ASTAMBUL	40,00	38,21	Tinggi	Tinggi	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. (2). Kurang representatifnya bangunan kantor sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja.	(1). Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal. (2). Ada beberapa inovasi yang dihasilkan di Kecamatan yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah
38	KECAMATAN BERUNTUNG BARU	56,10	58,12	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
39	KECAMATAN CINTA PURI DARUSSALAM	34,86	34,86	Sedang	Sedang	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
40	KECAMATAN GAMBUT	29,69	31,00	Rendah	Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	(1). Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
							(2). Ada beberapa inovasi yang dihasilkan di Kecamatan yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah
41	KECAMATAN KARANG INTAN	27,38	27,38	Rendah	Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
42	KECAMATAN KERTAK HANYAR	22,33	22,33	Sangat Rendah	Sangat Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	(1). Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
							(2). Ada beberapa inovasi yang dihasilkan di Kecamatan yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah
43	KECAMATAN MARTAPURA	20,81	20,81	Sangat Rendah	Sangat Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	(1). Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.

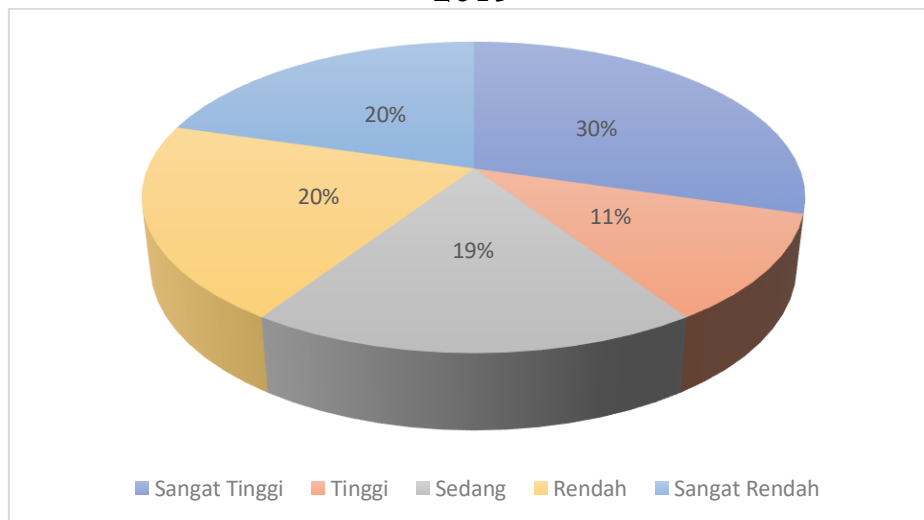
No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
						(2). Adanya keterlambatan dalam penyampaian SPJ Kelurahan sehingga mempengaruhi proses GU ,serapan realisasi fisik dan keuangan Kecamatan.	(2). Fasilitas kerja yang sudah cukup memadai
44	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	22,00	62,47	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	(1). Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
						(2). Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pekerjaan	(2). Ada beberapa inovasi yang dihasilkan di Kecamatan
45	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	36,29	42,90	Sedang	Tinggi	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	(1). Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
						(2). Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pekerjaan	(2). Ada beberapa inovasi yang dihasilkan di Kecamatan yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah
46	KECAMATAN MATARAMAN	38,41	35,05	Tinggi	Sedang	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	(1). Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
						(2). Sarana dan prasarana kantor yang masih kurang memadai	(2). Ada beberapa inovasi yang dihasilkan di Kecamatan

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
47	KECAMATAN PARAMASAN	24,88	29,70	Sangat Rendah	Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. (2). Letak kantor yang jauh dari pusat ibukota kabupaten	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
48	KECAMATAN PENGARON	28,67	28,67	Rendah	Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
49	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	26,68	26,68	Rendah	Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
50	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	33,00	33,00	Sedang	Sedang	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
51	KECAMATAN SUNGAI PINANG	26,51	22,74	Rendah	Sangat Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. (2). Letak kantor yang jauh dari pusat ibukota kabupaten	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
52	KECAMATAN SUNGAI TABUK	52,50	22,79	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
						(2). Kurangnya koordinasi internal khususnya terkait dengan sub bagian perencanaan sehingga menyulitkan koordinasi	
53	KECAMATAN TATAH MAKMUR	84,43	84,43	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
						(2), sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang masih kurang memadai	
54	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	30,55	30,55	Rendah	Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
Rata-Rata		36,91	30,43	Sedang	Rendah		

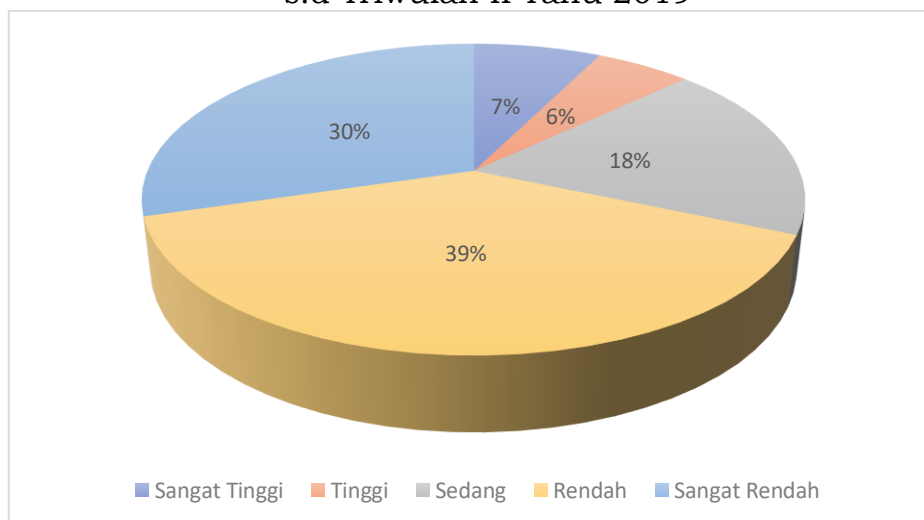
Dari formulir kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Banjar Triwulan II Tahun 2019 di atas, untuk kinerja fisik Pemerintah Kabupaten Banjar terdapat 16 OPD dengan predikat sangat tinggi, 6 OPD dengan predikat tinggi, 10 OPD dengan predikat sedang, 11 OPD dengan predikat rendah, dan 11 OPD dengan predikat sangat rendah. Berikut proporsi Capaian Fisik Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019:

Gambar 2. 1. Proporsi Capaian Fisik Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2019



Untuk kinerja keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2019, terdapat 4 OPD yang memiliki predikat sangat tinggi, 3 OPD dengan predikat tinggi, 10 OPD dengan predikat sedang, 21 OPD dengan predikat rendah, 16 OPD dengan predikat sangat rendah. Berikut Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019:

Gambar 2. 2. Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2019



Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, faktor penghambat keberhasilan kinerja sebagai berikut:

- ❖ Ada beberapa penamaan nomenklatur yang berbeda sehingga menunggu pergeseran
- ❖ Jadwal pengadaan diklat harus menyesuaikan skedul Badan diklat
- ❖ Komitmen dalam pencapaian target retribusi daerah yang belum terlaksana dengan baik.
- ❖ Sistem Pengelolaan Keuangan daerah yang belum Terintegrasi
- ❖ Belum optimalnya relevansi hasil perencanaan yang dilakukan
- ❖ Kerusakan alat cetak e KTP dan tidak adanya Serah Terima alat cetak tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Banjar tidak bisa memperbaikinya
- ❖ Kantor yang masih cukup kecil untuk menampung jumlah warga yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan

- ❖ beberapa Kegiatan dengan pendanaan DAK terkendala karena masih belum ada pada e-katalog pelaksanaan Kegiatan dengan pendanaan DAK yang terkendala regulasi
- ❖ keluarnya Peraturan Menteri PUPR Nomor : 07/PRT/M/2019 Tentang pengadaan jasa konstruksi yang tidak bersesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2016 tentang pengadaan barang jasa
- ❖ ketersediaan dana DAK pada Kas Daerah masih belum ada
- ❖ Penetapan pejabat pembuat komitmen yang terlambat karena pejabat yang membidang kegiatan tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang jasa
- ❖ ada perbup kita yang mengatur hibah harus diberikan kepada kelompok tani yang berbadan hukum dan waktu minimal 2 tahun sehingga kegiatan yang dilaksanakan hanya bisa pendampingan, monev dan sosialisasi
- ❖ Masih kurangnya kompetensi dan kualifikasi Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- ❖ Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebagai berikut:

- ❖ Komitmen yang tinggi pimpinan dan jajaran untuk mencapai target kegiatan secara maksimal
- ❖ Kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai dan dukungan dari mitra kerja
- ❖ Motivasi yang tinggi dari para personil untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya
- ❖ Ada beberapa inovasi yang dihasilkan di Kecamatan

Dari uraian faktor-faktor penghambat keberhasilan diatas, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan kinerja untuk Triwulan III sebagai berikut:

- ❖ Melakukan pergeseran anggaran
- ❖ Mencari informasi penyelenggara diklat diluar provinsi
- ❖ Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pemungut retribusi
- ❖ Melakukan koordinasi dengan LPSE Kab. Banjar
- ❖ Percepatan proses pengadaan barang dan jasa;
- ❖ Koordinasi dengan BPKAD guna penyediaan anggaran Kas DAK
- ❖ Peningkatan penyerapan keuangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- ❖ Identifikasi potensi efisiensi anggaran serta kegiatan yang tidak dapat terlaksana sampai dengan akhir tahun untuk dilaksanakan penyesuaian di perubahan; dan
- ❖ Fokus pencapaian target sasaran dan program perangkat daerah dengan tetap
- ❖ Peningkatan kompetensi ASN melalui diklat dan sosialisasi

mempertimbangkan prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran.

Adapun matriks Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 terlampir pada buku 2 dokumen Perubahan RKPD Kab. banjar Tahun 2019

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Dasar Pertimbangan Perubahan

3.1.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian daerah Kabupaten Banjar sangat bergantung dengan kondisi perekonomian nasional, karena wilayah Kabupaten tidak cukup mampu berpengaruh secara nasional, sedangkan variabel ekonomi nasional sangat berpengaruh terhadap variabel ekonomi daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Perekonomian Indonesia diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan dasar harga berlaku mencapai Rp14.837,4 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp56,0 Juta atau US\$3.927.

Perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan I-2019 diprakirakan tumbuh melambat, dikarenakan oleh perlambatan ekspor, investasi, dan konsumsi pemerintah. Perlambatan ekspor utamanya disebabkan oleh aktivitas Coal getting yang relatif tidak seagresif menjelang akhir tahun. Produksi karet juga diprakirakan kembali turun. Realisasi belanja operasional dan investasi pemerintah juga akan rendah pada awal tahun sebagaimana pola belanja setiap tahunnya. Di sisi lain, adanya peringatan Haul Guru Sekumpul akan mendorong belanja lembaga nonprofit RT serta menahan konsumsi RT untuk stabil. Inflasi triwulan I-2019 akan lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2018. Hal ini disebabkan oleh selesainya tekanan inflasi yang bersumber dari tingginya permintaan pada saat momen peringatan Hari Keagamaan pada triwulan sebelumnya.

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Banjar, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Semakin membaiknya perekonomian nasional dan regional akan memberi dampak pada perekonomian lokal. Hal tersebut tentu perlu dukungan arah kebijakan perekonomian daerah.

Salah satu dukungan arah kebijakan perekonomian adalah konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan pemerintah provinsi dan pusat yang berdasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2019.

Pada tahun 2018 nilai total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Banjar adalah sejumlah 16,09 triliun dimana nilai total PDRB ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 14,53 triliun pada tahun 2017 dan 13,34 triliun pada tahun 2016.

Seiring dengan perkembangan kondisi tersebut, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) Menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, (3) Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pemerataan pendapatan antar penduduk, (4) Memperbesar akses warga miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

3.1.2. Perubahan Asumsi Kebijakan Keuangan Daerah

A. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan

di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Proyeksi keuangan daerah tidak dapat terlepas dari pengaturan keuangan daerah atau pengelolaan keuangan daerah. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kerangka pendanaan dalam RKPD ini akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan Kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum menentukan APBD. Salah satu poin penting dalam menentukan kerangka pendanaan adalah sumber pendapatan.

Penetapan target pendapatan yang optimis harus menjadi perhatian lebih bagi Pemerintah Kabupaten Banjar, khususnya pendapatan yang berasal dari penerimaan dana perimbangan, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pendanaan program dan kegiatan terlebih dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yang mengamanatkan pengalokasian anggaran yang berasal dari APBD untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

B. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan maka pendapatan daerah tiap tahun diupayakan dapat terus meningkat dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan kebutuhan untuk pembangunan daerah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil evaluasi penerimaan pendapatan sampai dengan Bulan Mei Tahun 2019, disusun proyeksi pendapatan untuk semester dua tahun 2019. Optimalisasi penerimaan pendapatan dilakukan untuk pendapatan yang sudah memenuhi target, maupun yang masih belum mencapai target tengah tahun.

Secara umum pendapatan daerah tidak mengalami perubahan, tetapi harus menjadi perhatian lebih dalam rangka pencapaian target yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Banjar memasang skenario optimis pada target pendapatan, khususnya yang berasal dari dana perimbangan. Guna memenuhi target pendapatan yang sudah ditetapkan diperlukan kebijakan dan strategi pencapaian pendapatan daerah ditujukan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah. Beberapa kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, adalah :

- (1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
 - a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;

- d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan perpajakan;
 - e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Banjar.
 - f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan asset daerah seperti gedung, asrama, aula dan asset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan asset tersebut;
 - g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BULD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba BUMD;
 - h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Mengupayakan pemenuhan target penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam, strategi yang dilakukan antara lain;
 - a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
 - (3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan perangkat daerah dalam pengelolaan berbagai asset daerah;
 - (4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah menurut peraturan perundang-undangan.

C. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Tidak tercapainya asumsi pendapatan daerah serta penambahan beban anggaran akibat adanya kebijakan pemerintah mengharuskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk lebih cermat dan hati-hati dalam menentukan prioritas belanja. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah tersedia sumber pembiayaan yang akan digunakan. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut :

- Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
- Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
- Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 9 (sembilan) prioritas pembangunan Tahun 2019.
- Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

D. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2019 lebih diutamakan untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2018, dimana terdapat perubahan untuk anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebelumnya ditargetkan sebesar Rp. 64.377.043.268,00 mengalami peningkatan menjadi Rp.116.250.833.774,88. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan dengan target awal yaitu sebesar Rp.0 atau tidak ditargetkan.

Gambaran perubahan proyeksi/target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1. Proyeksi/target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun 2019

No.	URAIAN	APBD 2018	APBD 2019	
			MURNI	PERUBAHAN
A	Pendapatan Daerah	1.795.107.736.017	1.961.409.003.882	1.961.409.003.882
1	Pendapatan Asli Daerah	212.060.552.000	185.457.159.100	185.457.159.100
01.01	Pajak daerah	78.359.672.966	63.611.192.647	63.611.192.647
01.02	Retribusi daerah	7.478.012.218	7.583.205.174	7.583.205.174
01.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	7.058.688.335	7.921.441.551	7.921.441.551
01.04	Lain - lain pendapatan daerah yang sah	119.164.178.482	106.341.319.728	106.341.319.728
2	Dana perimbangan	1.266.904.181.055	1.385.834.438.431	1.385.834.438.431
02.01	Dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak	202.385.138.674	316.322.622.431	316.322.622.431
02.02	Dana alokasi umum	761.179.876.500	754.121.572.000	754.121.572.000
02.03	Dana alokasi khusus	303.339.165.880	315.390.244.000	315.390.244.000

No.	URAIAN	APBD 2018	APBD 2019	
			MURNI	PERUBAHAN
3	Lain - lain pendapatan daerah yang sah	316.143.002.262	390.117.406.351	390.117.406.351
03.01	Pendapatan hibah	38.816.436.817	52.587.633.351	52.587.633.351
03.02	Dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya	91.063.667.745	100.000.000.000	100.000.000.000
03.03	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	186.262.897.700	-	-
03.04	Dana desa	-	213.261.986.000	213.261.986.000
03.05	Dana insentif daerah	-	24.267.787.000	24.267.787.000
03.06	Bantuan keuangan dan provismsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	-
B	Belanja Daerah	1.863.179.414.132	2.025.786.047.150	2.077.659.837.656
1	Belanja Tidak Langsung	1.126.271.417.505	1.108.398.472.675	1.108.675.972.675
01.01	Belanja pegawai	697.737.905.701	742.724.248.075	742.724.248.075
01.02	Hibah	20.770.479.416	21.236.017.600	21.513.517.600
01.03	Bantuan sosial	3.669.839.378	8.021.684.000	8.021.684.000
01.04	Belanja kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	5.223.297.097	7.267.865.000	7.267.865.000
01.05	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten/kota dan pemerintah desa	398.724.510.207	326.648.658.000	326.648.658.000
01.06	Belanja tidak terduga	-	2.500.000.000	2.500.000.000
2	Belanja langsung	736.907.996.626	917.387.574.475	968.983.864.981
02.01	Belanja pegawai	147.737.152.338	127.489.093.990	
02.02	Belanja barang dan jasa	347.646.574.298	422.629.237.188	
02.03	Belanja modal	241.524.269.990	367.269.243.297	
Surplus/Defisit		- 68.071.678.115	- 64.377.043.268	- 116.250.833.774
C	Pembiayaan Daerah	149.349.986.225	64.377.043.268	116.250.833.774
1	Penerimaan Daerah	159.749.986.225	64.377.043.268	116.250.833.774
2	Pengeluaran daerah	10.400.000.000	-	-

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Kabupaten 2016-2021 telah mengalami perubahan dengan ditetapkannya peraturan daerah nomor 13 tahun 2018, ada beberapa indikator dan target sasaran pada RKPD Kab. Banjar yang perlu dilakukan perubahan agar menyesuaikan dengan RPJMD, disamping itu Perubahan RKPD Tahun 2019 juga disebabkan oleh adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Hal ini sejalan dengan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2018 yang salah satu unsurnya menetapkan besaran SiLPA pada tahun 2018. SiLPA merupakan bagian dari pos Pembiayaan yaitu pada Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dapat berfungsi sebagai simulasi mengatasi surplus/defisit dari kapasitas anggaran. Pada kondisi APBD mengalami defisit maka penerimaan pembiayaan yang salah satu komponennya bersumber dari SiLPA dapat menjadi penyeimbang kapasitas anggaran dengan mendasarkan pada pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan nasional juga berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Banjar 2019 yaitu pelaksanaan ketentuan pasal 30 ayat 9 (sembilan) Peraturan Pemerintah Tahun 2018 tentang kecamatan. Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan alokasi dana kelurahan minimal sebesar pagu terendah yang diterima desa di kabupaten.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan

Tujuan dan sasaran pembangunan diturunkan dari Visi dan Misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021. Visi Pembangunan Kabupaten Banjar 2016-2021 adalah *Terwujudnya*

Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah. Dalam upaya mewujudkan visi maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Selanjutnya melalui misi tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran daerah secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional pelaksanaan sebagai jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan dilaksanakannya revisi RPJMD Kab. Banjar maka tujuan dan sasaran mengalami perbaikan, adapun terkaitan tujuan dan sasaran pembangunan daerah disajikan di Tabel berikut:

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Pelestarian budaya keagamaan
			Pemberdayaan lembaga keagamaan
			Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
			Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat
			Meningkatnya pelestarian budaya
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			Mantapnya ketahanan pangan daerah
			Meningkatnya kesehatan reproduksi
			Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga
		Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja
			Membaiknya hubungan Industrial
		Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
Menurunnya risiko bencana	Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif		

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
3	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Meningkatnya nilai investasi
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam
4	Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi Meningkatnya akses dan kualitas sarana transportasi
		Meningkatnya kelayakhunian	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal
			Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
			Meningkatnya kualitas pembangunan desa
			Meningkatnya keterbukaan informasi publik
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah			

4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan 2019

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 disusun dengan memperhatikan:

- a. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019
- b. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019
- c. Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dan bersifat mendesak untuk diselesaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan

- Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019

Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019): “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”,

Selanjutnya dari tema RKP tersebut di tetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

- **Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019**

Menyelaraskan dengan tema RKP tahun 2019 maka tema yang diambil oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan di dalam dokumen RPKD tahun 2019 adalah:

“Bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang merata untuk Kalsel mapan”

Selanjutnya dari tema diatas maka ditetapkan 6 Prioritas pembangunan RPKD tahun 2019 sebagai berikut :

- ✚ Prioritas 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, terampil dan berbudi pekerti yang luhur melalui penerapan fungsi keluarga
- ✚ Prioritas 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan penerapan e-government”
- ✚ Prioritas 3 : Mengembangkan sarana prasarana strategis daerah untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata, industri, sentra pangan, perdagangan dan jasa
- ✚ Prioritas 4 : Peningkatan ketahanan energi dan pelestarian lingkungan
- ✚ Prioritas 5 : Penyiapan venue untuk menuju tuan rumah pon tahun 2024
- ✚ Prioritas 6 : Menyukkseskan pelaksanaan pemilu 2019

- **Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten banjar tahun 2019**

Penetapan tema RPKD Kab. Banjar Tahun 2019 dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang sudah berjalan dan upaya menghadapi isu yang berkembang di daerah serta memperhatikan rencana kerja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dari uraian di atas dapat diketahui tema RKP dan RPKD Prov. Kalsel Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 2. Sinkronisasi Tema RPKD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP Tahun 2019

Sinkronisasi Tema	
Tema RKP	Tema RPKD Provinsi Kalimantan Selatan 2019
Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas	Bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang merata untuk Kalsel mapan

Dengan mempertimbangkan sinkronisasi tema RKP dan RPKD Prov. Kalsel, maka tema RPKD Kabupaten Banjar Tahun 2019 adalah

“PENGUATAN SUMBERDAYA MANUSIA UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KABUPATEN BANJAR YANG SEJAHTERA DAN BAROKAH”

Tema RPKD Tahun 2019 menegaskan bahwa dalam menghadapi perubahan kondisi sosial dan ekonomi pada tahun 2019, mendukung prioritas nasional dan pemerintah provinsi Kalimantan selatan maka Pemerintah

Kabupaten Banjar akan melakukan pendekatan peningkatan mutu sumber daya manusia agar dapat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan produksi, serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

Indikator makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2019 dengan menyelaraskan target indikator makro RKP dan RKPD Prov. Kalsel serta dokumen perubahan RPJMD Kab. Banjar 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3. Keselarasan Indikator Makro antara RKP, RKPD Prov. Kalsel dan RKPD Kab. Banjar

Indikator Kinerja	Target 2019	Perubahan Target 2019	Target Prov. Kalsel Untuk Kab. Banjar	Target Nasional untuk Prov. Kalsel
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,26	5,31	5,26	8,6
Tingkat Inflasi (%)	5,5	3,80	4,2-4,3*	2,5-4,5**
Angka Pengangguran (%)	2,76	2,92	2,59	3,4
Angka Kemiskinan%	2,66	2,66	2,38	3.2
IPM	68,32	68,32	68,32	71,98**
Indeks Gini	0,30	0,34	0,279	0,38-0,39**

* Target Prov. Kalsel

** Target Nasional

Target Pertumbuhan ekonomi dilakukan perubahan menjadi 3,31 persen hal ini disebabkan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten banjar tahun 2018 sudah mencapai 5,28 persen dan menyesuaikan target pertumbuhan pada Perubahan RPJMD sehingga pemerintah kabupaten banjar meningkatkan targetnya. Dan untuk tingkat inflasi mengalami perubahan target, diharapkan dapat ditekan menjadi 3,80 persen menyesuaikan dengan perubahan di RPJMD.

Angka pengangguran di Kabupaten Banjar targetnya diturunkan menjadi 2,92 menyesuaikan dengan target di perubahan RPJMD dan melihat capaian ditahun 2018 sebesar 3,03 atau turun sebesar 0,08 dari tahun sebelumnya.

Angka kemiskinan di kabupaten banjar tidak mengalami perubahan, ditetapkan target lebih rendah dari nasional namun lebih tinggi dari Provinsi karena menurunkan angka kemiskinan bukanlah hal mudah, penurunan tiap tahunnya sangat kecil, walaupun penanggulangan kemiskinan ini sudah diintervensi berbagai bantuan baik dari pemerintah, Pemprov. Kalsel, pemerintah daerah maupun swasta angka penurunannya tetap kecil sekali.

Angka IPM kabupaten banjar ditargetkan sesuai dengan target provinsi untuk kabupaten banjar, diyakini akan dapat tercapai karena IPM tahun 2017 sudah pada angka 67,77. Selanjutnya untuk indikator Indeks gini ditetapkan target lebih tinggi dari prov. Kalsel namun lebih rendah dari target nasional. Melihat capaian tahun 2017 sebesar 0,35 akan sangat sulit dicapai apabila target sama dengan provinsi

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten banjar menetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan :

1. Penerapan Nilai-Nilai Agama

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Pelestarian budaya keagamaan, Pemberdayaan lembaga keagamaan dan Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Prioritas peningkatan kualitas pendidikan selaras dengan prioritas nasional ke 1 pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

2. Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan Meningkatkan budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat. Prioritas peningkatan kualitas pendidikan selaras dengan prioritas nasional ke 1 pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

3. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Mantapnya ketahanan pangan daerah, Meningkatkan kesehatan reproduksi dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Berolahraga . Prioritas ini selaras dengan prioritas nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

4. Peningkatan Kesempatan Kerja

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Meningkatkan kesempatan/ lapangan kerja dan Membaiknya hubungan Industrial. Prioritas ini selaras dengan prioritas nasional peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif

5. Peningkatan Ekonomi Daerah

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi, Meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi, Meningkatkan nilai investasi dan Meningkatkan pelestarian budaya. Prioritas ini selaras dengan prioritas nasional peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif

6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan Meningkatkan kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif Selaras dengan prioritas nasional pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan

7. Penataan Infrastruktur daerah

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Meningkatkan akses dan kualitas prasarana transportasi, Meningkatkan akses dan kualitas sarana transportasi, Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman dan Meningkatkan ketertiban ruang dan bangunan Selaras dengan prioritas nasional pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan selaras dengan prioritas nasional peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif

8. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Desa

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Meningkatkan Sumber Daya Aparatur daerah yang profesional dan handal, Meningkatkan integritas aparatur pemerintah daerah, Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, Meningkatkan partisipasi politik masyarakat, Meningkatkan kualitas pembangunan desa, Meningkatkan keterbukaan informasi publik, Meningkatkan kualitas pelayanan publik , Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Selaras dengan prioritas nasional stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

9. Perlindungan Sosial Masyarakat

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial dan Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. selaras dengan prioritas nasional

pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

Target dari masing-masing sasaran lebih rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 4. Rumusan Prioritas, sasaran dan program Kabupaten Banjar Tahun 2019

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
Penerapan Nilai-Nilai Agama	Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an	Persentase peserta didik yang lulus baca tulis Al-quran	96,00		Dihapus, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Kurikulum wajib pendidikan agama di sekolah formal	Persentase sekolah formal yang menyelenggarakan program baca tulis al-quran sesuai standar	18,087		Dihapus	Dinas Pendidikan
						Kawasan santri cerdas	Persentase pesantren yang mendapatkan pembinaan	40		Dihapus	Dinas Pendidikan
	Pelestarian budaya keagamaan	Persentase budaya keagamaan yang dilestarikan	70	66,66	Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Pelestarian Budaya Lokal	Persentase event-event keagamaan yang difasilitasi	70		Dihapus	Dinas Budpar
						Program pengembangan nilai budaya	Persentase even budaya yang bernilai religi		50,00%	Perubahan program	Dinas Budpar
						Penyelenggaraan perayaan Hari-Hari Besar keagamaan	Persentase Hari-hari besar keagamaan yang dirayakan			Dihapus	Setda
						Program penunjang penyelenggaraan hari-hari besar	Persentase hari-hari besar dan kegiatan keagamaan yang diperingati		100%	Perubahan program	Setda

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	Pemberdayaan lembaga keagamaan	Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan	20	9,92	Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Peningkatan pengelolaan lembaga zakat	persentase peningkatan dana zakat yang terkumpulkan	20		Indikator dihapus	Setda
							Jumlah ZIS yang terkumpul		83.200.000	Perubahan indikator	Setda
		Persentase aparatur daerah yang terbina	80		indikator dihapus	Pengawasan kinerja aparatur daerah	Persentase aparatur daerah yang terawasi	90		Dihapus	Inspektorat
		Persentase pesantren yang mendapatkan pembinaan		40%	Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program pendidikan non formal	Persentase sekolah formal yang menyelenggarakan program baca tulis al-quran sesuai standar		70%	Perubahan program	Dinas Pendidikan
	Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban umum	20		indikator dihapus	Penegakan Perda bernuansa agama	Persentase perda keagamaan yang dipatuhi	80		dihapus	Satpol PP
		Jumlah kasus ketenteram		619	Menyesuaikan	Program penegakan perda bernuansa kearifan lokal	Persentase kasus pelanggaran perda		100	Perubahan	Satpol PP

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
		an dan ketertiban umum			n Perubahan RPJMD		bernuansa agama diselesaikan			program	
						Pembinaan Peran serta Kepemudaan	Persentase organisasi Pemuda yang dibina	60	30	Dihapus	Dinas Pemuda dan OR
						Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda	Persentase Pemuda yang berpotensi dikembangkan IMTAQ dan Prestasinya	70		Indikator dihapus	Dinas Pemuda dan OR
							Persentase pemuda yang berpotensi dikembangkan IMTAQ		0,21	Perubahan indikator	Dinas Pemuda dan OR
						Pembinaan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang mampu berwirausaha	70		Indikator dihapus	Dinas Pemuda dan OR
						Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Persentase penurunan tingkat kriminalitas	5		Indikator dihapus	Badan Kesbangpol
							Persentase penurunan PEKAT (judi, miras,sajam) dan narkoba/ obat terlarang		2	Perubahan indikator	Badan Kesbangpol
						Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talk show, diskusi dan		450	Perubahan indikator	Badan Kesbangpol

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							peningkatan wawasan kebangsaan				
						Program kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat	Kasus terkait isu SARA		0 kasus	Perubahan indikator	Badan Kesbangpol
						Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase ormas yang terdaftar		15%	Perubahan indikator	Badan Kesbangpol
						Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat		100	Perubahan indikator	Badan Kesbangpol
Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya akses pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	70,59		Dihapus, penggabungan sasaran	Program Pendidikan Anak usia Dini	Persentase anak usia 4-6 tahun yang terlayani Pendidikan Anak Usia Dini	75	45	Indikator dihapus	Dinas Pendidikan
							Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		69,00%	Perubahan indikator	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7.10		sasaran dan indikator dihapus	Program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun	Persentase pencapaian SPM Pendidikan	49,335	86,20%	Naik	Dinas Pendidikan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan		57,58	Menyesuaikan Perubahan RPJMD		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	70,59			Dinas Pendidikan
							Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	96,45	92,00 %	Turun	Dinas Pendidikan
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	121,15	101,50 %	Turun	Dinas Pendidikan
							Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	67,86	67,86 %	tetap	Dinas Pendidikan
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	98,78	92,15 %	Turun	Dinas Pendidikan
						Program Pendidikan Non Formal	Persentase masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan kecakapan hidup	80		Indikator dihapus	Dinas Pendidikan
							Persentase masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan		80	Perubahan indikator	Dinas Pendidikan
							Persentase pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket sesuai standar	60	80	Naik	Dinas Pendidikan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Putus Sekolah SD dan SMP	0.23	0.23	penggabungan sasaran	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang bersertifikasi	60	60	Tetap	Dinas Pendidikan
		Angka kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTs	99,76	99,76			Persentase tenaga kependidikan non guru terlatih	60		Indikator dihapus	Dinas Pendidikan
							Persentase tenaga kependidikan guru terlatih		45		Dinas Pendidikan
		Rata-rata nilai UN SD dan SMP	70	70		Manajemen pelayanan pendidikan	Persentase sekolah yang terbina	5		Indikator dihapus	Dinas Pendidikan
	Persentase PAUD yang terbina						85,61%				Dinas Pendidikan
	Persentase SD yang terbina						76%				Dinas Pendidikan
	Persentase SMP yang terbina						100%				Dinas Pendidikan
							Persentase pencapaian SPM pendidikan terkait manajemen pelayanan pendidikan	65,78		Indikator dihapus	Dinas Pendidikan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
		Angka Melek Huruf	98	98		Pembinaan kurikulum PAUD	Persentase sekolah PAUD terbina	52,83		Indikator dihapus	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat	Rasio pemustaka terhadap penduduk usia > 6 tahun	5,1	4,52	Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Angka Kunjungan Perpustakaan	100%		Indikator dihapus	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
							Persentase peningkatan jumlah pengunjung		2,02%	Perubahan indikator	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
Peningkatan Akses Layanan Kesehatan	Menurunnya angka kematian	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	8		Penggabungan sasaran	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	72		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
						Deteksi kelainan kehamilan	Persentase Kunjungan Ibu Hamil minimal 4 kali (K4)	85		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan / Usia Harapan		67,66	sasaran baru, Menyesuaikan	Program kesehatan keluarga	Persentase keluarga yang memenuhi 12 Indikator kesehatan		60	Penambahan Program	Dinas Kesehatan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
		Hidup (UHH)			n Perubahan RPJMD						
						Program upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas	Persentase pencapaian indikator SPM di Puskesmas	100	100	Program dihapus	Dinas Kesehatan
						Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/ pustu dan jaringannya	Persentase puskesmas yang terakreditasi	100		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
							Persentase puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik		77,40	Perubahan indikator	Dinas Kesehatan
						Peningkatan Program Indonesia Sehat - Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 12 Indikator	Persentase capaian Program PIS-PK	95		Program dihapus	Dinas Kesehatan
		Persentase kematian ibu melahirkan risiko tinggi di rumah sakit			dihapus	Peningkatan Pelayanan PONEK	Persentase pencapaian indikator mutu pelayanan kesehatan ibu		0	Program dihapus	RSUD
							Persentase Tenaga Medis yang terbina	6 org			RSUD
							Persentase pencapaian Indikator Mutu	2 Unit			RSUD

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Keperawatan Unit Perawatan Ibu				
							Persentase Perawat/Bidan pada unit Perawatan Ibu yang lulus dan/atau sudah tersertifikasi Asesment Kompetensi	38 org			RSUD
							Persentase Perawat/Bidan Klinik yang telah lulus dan/atau sudah tersertifikasi Asesor Kompetensi	1 org			RSUD
							Persentase Asuhan Keperawatan/Kebidanan yang sesuai dengan Standar Asuhan Keperawatan/Kebidanan (SAK)	11 Dok			RSUD
							Persentase Alat-Alat Kesehatan Ponek pada Rumah Sakit dalam kondisi baik dan sesuai standar	1 Paket			RSUD
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000	65	65	dihapus	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan kunjungan neonatal	100		Program dihapus	Dinas Kesehatan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
		kelahiran hidup									
							Cakupan Penanganan Kasus Baru Pneumonia Pada Balita melalui MTBS	75			Dinas Kesehatan
							Cakupan imunisasi lengkap	97			Dinas Kesehatan
		Persentase kematian bayi BBLR			dihapus					Program dihapus	
	Menurunnya angka kesakitan	Prevalensi penyakit menular	1,75		dihapus	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase Pencapaian SPM kesehatan	1,75		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
							Angka penemuan kasus penyakit menular	1,75		Perubahan indikator	Dinas Kesehatan
						Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase obat dan perbekalan kesehatan dalam kondisi baik	90 dan 63 persen		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
							Persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan obat,		90,00 %	Perubahan	Dinas Kesehatan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							BAKHP, BMHP dan vaksin			indikator	
							Persentase puskesmas yang memiliki perbekalan dan alat kesehatan sesuai standar		50,00 %	Perubahan indikator	Dinas Kesehatan
						Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase hasil produksi makanan skala rumahan yang lolos uji laboratorium dinas kesehatan	70		dihapus	Dinas Kesehatan
						Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase pengendalian penyakit berbasis kolaboratif	95		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
							Cakupan ke peserta jaminan kesehatan		95	Perubahan indikator	Dinas Kesehatan
		Prevalensi penyakit tidak menular (PTM)	8		dihapus	Program pengendalian penyakit tidak menular	Persentase Puskesmas dengan Pandu PTM	40		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
							Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM (Utama)		85,00 %	Perubahan indikator	Dinas Kesehatan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA		41,67 %	Perubahan indikator	Dinas Kesehatan
						Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase UKBM Purnama dan Mandiri	60		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
							Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan berwawasan kesehatan		60	Perubahan indikator	Dinas Kesehatan
						Program upaya kesehatan tradisional	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan Kesehatan Tradisional		45,00 %	Penambahan program	Dinas Kesehatan
						Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase Kecamatan Yang Melaksanakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)		00,00 %	Penambahan program	Dinas Kesehatan
							Persentase Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Kerja		50,00 %		Dinas Kesehatan
							Persentase Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga		25,00 %		Dinas Kesehatan
	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	23		dihapus	Perbaiki gizi masyarakat	Status gizi keluarga	10,25		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Prevalensi status gizi balita kurus		10,25	Perubahan indikator	Dinas Kesehatan
						Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	100		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
							Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal predikat madya		71,43	Perubahan indikator	Dinas Kesehatan
						Program Pelayanan kesehatan BLUD	Persentase pencapaian indikator SPM BLUD	85		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
	Mantapnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan		50,9	sasaran baru, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Tingkat Ketersediaan energi dan protein perkapita	100	101	Naik	Dinas Ketahanan Pangan
							Stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen	< 25	< 26	Naik	Dinas Ketahanan Pangan
							Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	91,3	91,3	Naik	Dinas Ketahanan Pangan
							Kategori/ Skor Keamanan Pangan (SKP)	67	73	Naik	Dinas Ketahanan Pangan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	Meningkatnya kesehatan reproduksi	Persentase kelahiran pada usia ideal (20-40 tahun)	60		dihapus	Program Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS dengan usia istri di bawah usia 20 tahun	15%	15%	tetap	Dinas PPKBP3A
							Persentase akseptor KB aktif		70%	Penambahan indikator	Dinas PPKBP3A
		Tingkat pertumbuhan penduduk		1,5	Indikator sasaran baru, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan akseptor KB Aktif	70%		dihapus	Dinas PPKBP3A
							Persentase akseptor KB baru				Dinas PPKBP3A
							Cakupan akseptor KB MKJP				Dinas PPKBP3A
						Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase Kelompok bina ketahanan dan Kesejahteraan keluarga yang aktif	50%		Indikator dihapus	Dinas PPKBP3A
							Persentase kelompok bina ketahanan yang aktif		50%	Perubahan indikator	Dinas PPKBP3A
							Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang terbentuk		80%	indikator	Dinas PPKBP3A

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Indeks Pembangunan Keolahragaan	N/A		Indikator dihapus	Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga	Persentase FASUM yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga massal	100		Indikator dihapus	Dinas Pemuda dan OR
							Persentase FASUM yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga		60	Perubahan indikator	Dinas Pemuda dan OR
		Indeks kebugaran		0,50	Indikator sasaran baru, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Sarana dan Prasarana	Persentase Kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	100	10	Turun	Dinas Pemuda dan OR
						Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga	Terwujudnya Peringkat prestasi olahraga (POPDA, POMDA)	100		Indikator dihapus	Dinas Pemuda dan OR
Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan/lapangan kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	276	0,01	Perubahan target Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan peluang kerja baru	5%	5%	Tetap	Dinas Nakertrans
						Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	1%	1%	tetap	Dinas Nakertrans

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	Membaiiknya hubungan industrial	Persentase Penurunan Sengketa Industrial	0,06	6	Perubahan target Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase sengketa industrial yang diselesaikan	6%	100%	Naik	Dinas Nakertrans
Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	N/A		Dihapus	Program peningkatan ketahanan pangan	Pertumbuhan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura : 1. padi sawah 2. padi ladang 3. jagung 4. kedelai 5. jeruk 6. pisang 7. durian		2,31% 2,31% 2,03% 1,99% 2,10% 2,02% 2,04%	Penambahan program	Dinas TPH
		Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian		2,05	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan Padi Sawah Produktivitas Tanaman Pangan Padi Ladang	2,25 2,18		Indikator dihapus	Dinas TPH
							Pertumbuhan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura : 1. padi sawah 2. padi ladang 3. jagung 4.		2,25% 2,181, 39% 2,01% 2,00% 2,	Perubahan indikator	Dinas TPH

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							kedelai5. jeruk6. pisang7. durian		31%2,00%		
						Program peningkatan penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan nilai kelas kelompok tani (%) Persentase penyuluh yang lulus diklat dengan predikat baik		30 % 100%	Penambahan program	Dinas TPH
						Program penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa	Luasan lahan pertanian yang terlayani air irigasi		82,00 %		Dinas PUPR
						Program penanganan jaringan perairan	Rasio jaringan irigasi		18,51 %		Dinas PUPR
						Program Peningkatan Produksi perkebunan	Meningkatnya produksi perkebunan	2,43		Indikator dihapus	Dinas Nakhun
							Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan		1,32		Dinas Nakhun
						Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase produk pertanian yang masuk dalam data informasi harga pasar	66,7		Indikator dihapus	Dinas Nakhun
							Persentase peningkatan pemasaran produk perkebunan	5		Indikator dihapus	Dinas Nakhun

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							1. Pertumbuhan komoditi pengolahan hasil pertanian yang dibina 2. Pertumbuhan jenis pengolahan hasil pertanian yang dibina		33,33 % 28,57 %		Dinas Nakhbun
						Program peningkatan pemasaran hasil pertanian/ perkebunan	Persentase peningkatan produksi karet sit yang dihasilkan UPPB		2,73%	Penambahan program	Dinas Nakhbun
						Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase peningkatan kelahiran ternak	1,27	2,62%	Tetap	Dinas Nakhbun
						Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya Pemotongan Ternak DI RPH, RPU	4,14		Indikator dihapus	Dinas Nakhbun
							Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil ternak		1%	Perubahan indikator	Dinas Nakhbun
						Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.	Persentase menurunnya angka kematian ternak : ternak besar unggas		<0,33 % <6,30 %	Penambahan program	Dinas Nakhbun
						Program peningkatan kesejahteraan petani	Persentase kelompok tani yang teridentifikasi dan difasilitasi bantuan		1,00%		Dinas Nakhbun

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Program pemberdayaan penyuluh peternakan/ perkebunan lapangan	Persentase penyuluh yang mengikuti sertifikasi, pelatihan dan bimtek		22,00 %		Dinas Nakhun
		Pertumbuhan PDRB sektor perikanan		5,04	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	60000 Ton	3.985	Perubahan target	Dinas Perikanan
						Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	10310 Ton	0.050	Perubahan target	Dinas Perikanan
						Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Volume Pemasaran terhadap komoditas perikanan	720 Ton		Indikator dihapus	Dinas Perikanan
							Produksi olahan hasil perikanan (ton)		730		Dinas Perikanan
						Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum sumberdaya perikanan	Persentase kepatuhan terhadap peraturan perundangan perikanan		81%	Penambahan program	Dinas Perikanan
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi	Persentase Peningkata	1	4	Perubahan target Indikator	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi yang aktif	5	65,5	Naik	Dinas Koperasi UM

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	n Omzet Koperasi			sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD						
						Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Persentase koperasi yang sehat	100 %		Indikator dihapus	Dinas Koperasi UM
							1. Pertumbuhan modal koperasi 2. Pertumbuhan SHU koperasi		10,00 8,00	Perubahan indikator	Dinas Koperasi UM
		Persentase peningkatan omzet UKM	N/A	5,2	Perubahan target Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha kecil dan menengah	Persentase UKM yang layak bank	100 %		Indikator dihapus	Dinas Koperasi UM
							UM bankable.		500		Dinas Koperasi UM
						Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro	100 %		Indikator dihapus	Dinas Koperasi UM

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Persentase pertumbuhan Usaha Mikro yang memiliki IUMK		29,78 %	Perubahan indikator	Dinas Koperasi UM
						Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Persentase pertumbuhan usaha mikro baru	100 %		Indikator dihapus	Dinas Koperasi UM
							Perkembangan UM yang bermitra dengan pengusaha besar (BUMN atau swasta)		50	Perubahan indikator	Dinas Koperasi UM
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	5.10		Dihapus, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Komoditi Karet	10	10	Tetap	Dinas Perindag
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan		7,10	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Bina usaha dan pelaku distribusi	Persentase Pelaku Usaha Kecil Menengah, Besar dan PKL serta Asongan yang dibina	33	32	Turun	Dinas Perindag
						Peningkatan Sarana dan Distribusi perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan dan dikembangkan	33	31	turun	Dinas Perindag
						Peningkatan pemasaran produk dalam negeri	Persentase produk/komoditi daerah yang dipasarkan	36	28	turun	Dinas Perindag

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase pelaku tertib niaga	25	20	Turun	Dinas Perindag
						Pengendalian perdagangan dalam negeri	Rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu	39		Indikator dihapus	Dinas Perindag
							Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan dikendalikan		9	Perubahan indikator	Dinas Perindag
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	N/A		Dihapus, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Pengembangan Industri Berbasis Sektor ILMEASA	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri ILMEASA	2	1	Turun	Dinas Perindag
		Persentase pertumbuhan industri		6,10	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Pengembangan Industri Berbasis Sektor AGROKIM	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri AGROKIM	2	1	Turun	Dinas Perindag
						Penataan Struktur Industri	Persentase Cakupan Pengembangan Sentra Industri	50	75	Naik	Dinas Perindag

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,119		Dihapus, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	75	63,46 %	Turun	Dinas Budpar
		Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata		6,51	perubahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Pengembangan Kemitraan	Persentase pelaku wisata yang aktif	67,05	51,89 %	Penurunan target	Dinas Budpar
						Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	70		Indikator dihapus	Dinas Budpar
							Jumlah inovasi pemasaran pariwisata		3	Perubahan indikator	Dinas Budpar
	Meningkatnya nilai investasi	Persentase pertumbuhan investasi (PMDN dan PMA)	86	1	perubahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	1,7 T	1,7 T	Tetap	Dinas PMPTPS
						Penyiapan potensi sumber daya sarana & prasarana	Persentase infrastruktur penunjang investasi yang tersedia			Indikator dihapus	Dinas PMPTPS

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Peningkatan promosi dan kerja sama investasi	Persentase realisasi komitmen investasi dari promosi dan kerja sama investasi	100 %		Indikator dihapus	Dinas PMPTPS
							Pertumbuhan investor		30	Perubahan indikator	Dinas PMPTPS
	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase kebudayaan benda dan tak benda yang dilestarikan	62,5		Dihapus, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	86	83	Tetap	Dinas Budpar
		Persentase budaya dilestarikan		70,73	perubahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program Pengembangan Kerja sama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase mitra kerja sama aktif	58,82		dihapus	Dinas Budpar
						Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan kajian seni	72,73		Indikator dihapus	Dinas Budpar
							Persentase benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya		45,71	Perubahan indikator	Dinas Budpar
						Program aktualisasi unsur budaya	Persentase penelitian/pengkajian	100		Program	Dinas Budpar

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							sejarah yang dimanfaatkan			dihapus	
						Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase even budaya yang bernuansa religi	57,14		Program dihapus	Dinas Budpar
		Persentase budaya benda yang dilestarikan	75,76			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah warisan/cagar budaya yang dikelola	47,22		Indikator dihapus	Dinas Budpar
						Program pengelolaan Informasi budaya	Persentase ketersediaan data kebudayaan		70,79	Penambahan program	Dinas Budpar
Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	indeks kualitas air (IKA)		39	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD						Dinas LH
		indeks kualitas udara (IKU)		106	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD						Dinas LH
		indeks tutupan lahan (ITP)		65,64	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan						Dinas LH

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
					n Perubahan RPJMD						
	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	39	39	Sasaran dihapus	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Pencemar Institusi dan Non Institusi Yang Telah dilakukan Pembinaan dan Pemantauan	15		Indikator dihapus	Dinas LH
							Persentase Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan		25	Perubahan indikator	Dinas LH
							Persentase Jumlah Pencemar Institusi dan Non Institusi Yang Telah dilakukan Pembinaan dan Pemantauan		15		Dinas LH
							Indeks Kualitas Air	36			Dinas LH
						Program pengendalian kerusakan lingkungan hidup	Persentase menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar		35	Penambahan program, menyesuaikan perubahan RPJMD	Dinas LH
						Program pengembangan sistem informasi dan instrumen lingkungan hidup	Persentase Data Base Informasi Lingkungan yang Valid/update		25		Dinas LH
							Persentase perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan		80		Dinas LH

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Program penataan SDA, lingkungan dan pengendalian dampak perubahan Iklim	Presentasi kawasan yang lestari, hijau, indah nyaman sejahtera dan Barokah serta terpeliharanya hutan, lahan dan keanekaragaman hayati		20%		Dinas LH
							Persentase kawasan yang telah dibina dan dikembangkan untuk menjadi kawasan yang hijau, hemat energi dan mandiri		20%		Dinas LH
						Program penegakan hukum lingkungan	Persentase ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup		50%		Dinas LH
							Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan		70%		Dinas LH
						Program pembinaan dan penataan di bidang lingkungan	Persentase kepala keluarga yang peduli lingkungan		20%		Dinas LH
							Persentase sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata		20%		Dinas LH

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88	106	Penggabungan sasaran, indikator masih digunakan	Peningkatan Pengendalian Polusi	Tingkat polusi udara			dihapus	Dinas LH
							Persentase penurunan kebakaran hutan dan lahan				Dinas LH
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Persentase peningkatan luas RTH			Dihapus, penggabungan sasaran	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan	2	1,75	Penurunan target	Dinas LH
							Persentase luas RTH yang terpelihara			Indikator dihapus	Dinas LH
	Meningkatnya persentase volume sampah yang tertangani	Persentase volume sampah yang tertangani			Dihapus, penggabungan sasaran	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah melalui 3R			Program dihapus	Dinas LH
	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana secara optimal	<i>Persentase Peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah</i>	70%		Dihapus, penggabungan sasaran	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Pencegahan Dini dan Mitigasi Bencana	70%	70%	tetap	BPBD

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
		<i>rawan bencana</i>									
	Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif	<i>Persentase peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha</i>		70%	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program pencegahan dini & penanggulangan korban bencana alam.	Persentase desa yang mendapat fasilitasi pengurangan risiko bencana		759%	Penambahan program, menyesuaikan perubahan RKP D	BPBD
		<i>Persentase penanganan RR (rehabilitasi dan rekonstruksi)</i>		20%	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program tanggap darurat.	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi.		100%		BPBD
						Program pengendalian daya rusak air	Luasan kawasan banjir yang terlindungi		1%		BPBD
						Program pasca bencana	Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi		80%		BPBD
						Program perencanaan penanggulangan bencana	Implementasi dokumen perencanaan penanggulangan bencana		100%		BPBD

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
Penataan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya akses dan kualitas prasarana perhubungan	Rasio prasarana perhubungan			sasaran dan indikator dihapus	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio aksesibilitas			Perubahan indikator	Dinas PUPR
	Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi	Persentase prasarana transportasi		61,34	penambahan Sasaran dan Indikatornya, Menyesuaikan Perubahan RPJMD		Persentase Panjang Jaringan Jalan yang Dibangun		40,35 %	Perubahan indikator	Komposit
						Program penanganan jalan kabupaten	Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap		70,13 %	Penambahan program,	Dinas PUPR
						Program penanganan jembatan kabupaten	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik		91,13 %	menyesuaikan	Dinas PUPR
						Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Persentase Tersedianya Database Jaringan Jalan yang Up to Date		100,00 %	perubahan RPJMD	Dinas PUPR
						Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Persentase Penilaian Kemampuan penanganan jalan dan jembatan dalam kondisi darurat		5,58%		Dinas PUPR
						Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase penilaian kemampuan alat berat		1,70%		Dinas PUPR

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							dalam menunjang kegiatan kebinamargaan				
						Program penanganan jalan poros desa	Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap		75,11 %		Dinas PUPR
						Program penanganan jembatan desa	Persentase Jembatan Desa dalam Kondisi Baik		66,84 %		Dinas PUPR
						Program pemenuhan prasarana perhubungan	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan dalam kondisi baik		80,00 %		Dinas Perhubungan
						Program pengelolaan dan pengoperasian prasarana perhubungan	Persentase angkutan umum yang masuk terminal		83,95 %		Dinas Perhubungan
						Program pembangunan dan pengelolaan lalu lintas perhubungan darat	Persentase ketersediaan rambu yang layak		70,00 %		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya akses dan kualitas sarana transportasi	Persentase sarana transportasi		85,99%	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Peningkatan pelayanan angkutan	Rasio simpul jaringan transportasi	90		Indikator dihapus	Dinas Perhubungan
							Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum	90			Dinas Perhubungan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Persentase angkutan umum yang beroperasi		80,00 %	Perubahan indikator	Dinas Perhubungan
						Program Pembinaan Keselamatan Berjalan Lintas	Angka Kecelakaan	3,57		Indikator dihapus	Dinas Perhubungan
							Persentase ketaatan berlalu-lintas		83,00 %	Perubahan indikator	Dinas Perhubungan
						Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan wajib uji yang lolos PKB	100		Indikator dihapus	Dinas Perhubungan
							Persentase kendaraan wajib uji yang lolos PKB		94,96 %	Perubahan indikator	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Kualitas Hunian dan Lingkungan Perumahan	Persentase Hunian dan Lingkungan Perumahan yang layak	100		sasaran dan indikator dihapus	Pengembangan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase luasan kualitas kawasan permukiman	0,02	0,02	tetap	Dinas Perkim
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak	Persentase rumah layak huni		97,71	penambahan Sasaran dan Indikatornya	Koordinasi Penyelenggaraan	Persentase tertibnya penyelenggaraan	100		Indikator	Komposit

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	huni dan lingkungan permukiman yang nyaman				, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	perumahan dan kawasan permukiman			dihapus	
							Persentase ketersediaan kebijakan di bidang perumahan	100,00%	100	Perubahan indikator	Dinas Perkim
						Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Perumahan	Persentase cakupan rumah layak huni yang ditangani	92,69	93,14%	Naik	Dinas Perkim
						Penyelenggaraan Perizinan Di Bidang Perumahan Dan Permukiman	Persentase perizinan yang difasilitasi	100	100,00%	Tetap	Dinas Perkim
		Persentase lingkungan pemukiman yang nyaman		48,41	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	32,36	30,19%	Turun	Dinas Perkim
						Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Cakupan pelayanan peningkatan kualitas/pencegahan kumuh	10 Kecamatan	33,33%	Perubahan target	Dinas Perkim
						Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase penerangan jalan yang dilalui angkutan umum	81,5	81,50%	Tetap	Dinas Perkim

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Program penanganan jalan lingkungan permukiman	Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang		83,27 %	Penambahan program, penyesuaian perubahan RPJMD	Dinas Perkim
						Program pengembangan kualitas kawasan permukiman	Persentase jalan lingkungan yang terlayani penerangan		12,00 %	Penambahan program, penyesuaian perubahan RPJMD	Dinas Perkim
						Program peningkatan kinerja pengelolaan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman		71,10 %	Penambahan program, penyesuaian perubahan RPJMD	Dinas PUPR
						Program penanganan dan pengelolaan jaringan air baku	Persentase ketersediaan/kapasitas tampung air baku		71,37 %		Dinas PUPR
						Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan limbah		45,57 %		Dinas PUPR
						Program penanganan drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan		37,72 %		Dinas PUPR

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase				
							Persentase pengurangan genangan		60,00 %		Dinas PUPR
						Program pengembangan kawasan strategis	Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis		79,47 %		Dinas PUPR
						Program pengelolaan sampah	Persentase pengurangan sampah		20,00 %		Dinas LH
							Persentase penanganan sampah		80,00 %		Dinas LH
							Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3		30,00 %		Dinas LH
						Program pengelolaan sampah (BLUD)	Persentase sampah yang terkelola di TPA		00,00 %		Dinas LH
						Program peningkatan dan pengembangan BLUD Intan Hijau	Jumlah jenis produk yang dihasilkan oleh BLUD Intan Hijau		7		Dinas LH
						Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan		1,75%		Dinas LH
						Program pencegahan dini bahaya kebakaran	Persentase peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya		35,29 %		Satpol PP

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Program peningkatan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respons rate time) penanggulangan bahaya kebakaran		30,00 %		Satpol PP
	Meningkatnya ketertiban ruang, tanah dan bangunan	Persentase ketertiban tata guna tanah			dihapus	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase sengketa pertanahan yang diselesaikan			Dihapus	Dinas Pertanahan
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang	95		Dihapus	Perencanaan tata ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital			Dihapus	Dinas PUPR
	Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	Persentase pemanfaatan tata ruang dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang		56,28%	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program perencanaan rencana umum tata ruang	Persentase penilaian kesesuaian RUTR terhadap dinamika pembangunan		60,00 %	Penambahan program	Dinas PUPR
						Program perencanaan rencana rinci tata ruang	Persentase penyusunan rencana rinci tata ruang		40,00 %	Penambahan program	Dinas PUPR

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai pelanggaran rencana tata ruang melalui pengawasan teknis dan khusus				Dinas PUPR
							Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang		92,13 %		Dinas PUPR
		Persentase bangunan sesuai standar			dihapus	Peningkatan bangunan gedung	Persentase IMB diterbitkan			dihapus	Dinas PUPR
							Persentase tersedianya informasi jasa konstruksi			Dihapus	Dinas PUPR
		Persentase pemanfaatan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang			dihapus	Program penataan bangunan dan tata lingkungan	Persentase tersedianya tata Bangunan dan Lingkungan		64,00 %	Penambahan program, penyesuaian Perubahan RPJMD	Dinas PUPR
						Program pengendalian dan pengawasan bangunan	Persentase Kesesuaian Bangunan terhadap tata Ruang		3,33%		Dinas PUPR
						Program pelatihan tenaga terampil konstruksi	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang		80,00 %		Dinas PUPR

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							memenuhi persyaratan kompetensi				
						Program penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten	Persentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi		90,00 %		Dinas PUPR
						Program penerbitan ijin usaha jasa konstruksi nasional	persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan 10 (sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap		00,00 %		Dinas PUPR
						Program pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan konstruksi	persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi		54,00 %		Dinas PUPR
Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Desa	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur daerah yang profesional dan handal	Indeks profesionalisme ASN		59,49	Penambahan indikator	Penataan aparatur daerah	Persentase penempatan ASN pada jabatan yang sesuai kompetensi	100 %		dihapus	BKDSDM

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur daerah	Persentase aparatur daerah yang lulus diklat pim, fungsional, dan teknis	100 %		Dihapus	BKDSDM
						Pembinaan dan pengembangan aparatur	Nilai SKP	100 %		Dihapus	BKDSDM
						Program pengembangan aparatur	Persentase jabatan sesuai kompetensi		76,50 %	Penambahan program	BKDSDM
						Program pembinaan aparatur	Nilai SKP		88,00 %		BKDSDM
						Pelayanan administrasi kepegawaian	IKP (Indeks Kepuasan Pengguna) administrasi kepegawaian	100 %	87,00 %	Turun	BKDSDM
						Program disiplin aparatur	Persentase ASN yang tidak melanggar peraturan disiplin		99,25 %	Penambahan program	BKDSDM
						Program kesejahteraan aparatur	Terfasilitasnya kesejahteraan ASN		100,00 %		BKDSDM
	Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah	Persentase SKPD dengan zona Integritas			dihapus	Program pencegahan terhadap penyimpangan dan korupsi	Pencanangan SKPD yang menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	4 SKPD		dihapus	Inspektorat
		Indeks kepatuhan		88,38		Program pencegahan dan pemberantasan korupsi	Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM		5%	Penambahan program	Inspektorat

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							(Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)				
						Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	3 level	3 level	tetap	Inspektorat
						Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP	3 Level	3 Level	Tetap	Inspektorat
						Program Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat	80		Indikator dihapus	Inspektorat
							Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti		80	Perubahan indikator	Inspektorat
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai Sakip	BB	70,01		Perencanaan pembangunan daerah	Persentase Ketepatan waktu perencanaan	100	100	Tetap	Bappeda Litbang
						Perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi	Persentase rata-rata nilai sakip bidang ekonomi	71,78		Indikator dihapus	Bappeda Litbang

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Program perencanaan pembangunan ekonomi	Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang perekonomian		71,78	Perubahan indikator	Bappeda Litbang
						Perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya dan SDM	Persentase rata-rata nilai sakip bidang sosial budaya dan SDM	65		Indikator dihapus	Bappeda Litbang
						Program perencanaan pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya & pemerintahan	Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang sosial budaya dan sumber daya manusia		65	Perubahan indikator	Bappeda Litbang
						Perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan	Persentase nilai rata-rata sakip bidang infrastruktur dan pengembangan	70		Indikator dihapus	Bappeda Litbang
						Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah		70	Perubahan indikator	Bappeda Litbang
						Penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil litbang yang ditindaklanjuti	50	50	Perubahan indikator	Bappeda Litbang
							Persentase usulan inovasi yang diterapkan	50	50	Perubahan indikator	Bappeda Litbang

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Pengembangan data perencanaan pembangunan daerah	Persentase elemen data pembangunan yang termutakhir	50	50	Perubahan indikator	Bappeda Litbang
							Persentase peningkatan jumlah penerima manfaat data informasi pembangunan	50	50	Perubahan indikator	Bappeda Litbang
						Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan	Persentase ASN perencana yang memiliki kompetensi perencanaan daerah	70	70	Perubahan indikator	Bappeda Litbang
	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase Jumlah Parpol yang Menyampaikan laporan Pertanggung jawaban bantuan keuangan sesuai peraturan	100		dihapus	Pendidikan politik masyarakat	Persentase Parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai standar	90		Indikator dihapus	Badan Kesbangpol
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu		73,00%			Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif dan presiden		73,00%	Perubahan indikator	Badan Kesbangpol

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada provinsi		73,00 %	Perubahan indikator	Badan Kesbangpol
	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Nilai Evaluasi Perkembangan Desa	475		dihapus	Pembinaan bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan dan aset desa	Nilai Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Pemerintahan	185	137	Turun	Dinas PMD
		Skor evaluasi perkembangan desa		416			Persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik	80	60	Turun	Dinas PMD
						Pembinaan bidang kewilayahan desa	Nilai Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Kewilayahan	149	104	Turun	Dinas PMD
						Pembinaan Bidang Kemasyarakatan Desa	Nilai Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Kemasyarakatan	221	175	Turun	Dinas PMD
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2,3		Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi	Tingkat maturitas tata kelola SPBE			Indikator dihapus	Dinas Kominfo
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik		70			Tingkat kematangan domain kebijakan internal SPBE (indeks)		2,29	Perubahan indikator	Dinas Kominfo

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Tingkat kematangan domain tata kelola SPBE (indeks)		2,57	Perubahan indikator	Dinas Kominfo
							Tingkat kematangan domain layanan SPBE (indeks)		2,15	Perubahan indikator	Dinas Kominfo
						Kerja sama informasi dan media massa	Tingkat maturitas layanan SPBE			Indikator dihapus	Dinas Kominfo
							Rasio berita positif dan negatif di media tentang Kabupaten Banjar		91,12 %	Perubahan indikator	Dinas Kominfo
						Pengamanan informasi	Pemeringkatan level keamanan informasi		273	Perubahan indikator	Dinas Kominfo
						Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase kelengkapan data statistik sektoral			Indikator dihapus	Dinas Kominfo
							Persentase layanan Item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat		66,6	Perubahan indikator	Dinas Kominfo
						Pengadaan barang dan jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang	92		Indikator	Setda

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							dilaksanakan Dengan Tuntas			dihapus	
							Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tepat waktu		90	Perubahan indikator	Setda
						Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	100 %		Indikator dihapus	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
							Persentase unit pengelola kearsipan yang menyusun arsip secara baku		65,80 %	Perubahan indikator	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase SKPD yang menyusun arsip secara baku			Indikator dihapus	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
							Cakupan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		100%	Perubahan indikator	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
						Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase capaian kinerja perbaikan sistem administrasi kearsipan		65,80 %	Perubahan indikator	Dinas Perpustakaan &

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
											Arsip Daerah
						Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Respons layanan Informasi kearsipan		10	Perubahan indikator	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,20%	81,90%	perubahan target	Pelayanan dan penataan administrasi pencatatan sipil	Persentase Rata-rata kepemilikan akta catatan sipil	70%		Indikator dihapus	Dinas Dukcapil
							Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0 - 18 th		70%	Perubahan indikator	Dinas Dukcapil
							Persentase perkawinan penduduk yang didata		1%	Perubahan indikator	Dinas Dukcapil
							Persentase perceraian penduduk yang didata		1%	Perubahan indikator	Dinas Dukcapil
							Cakupan penerbitan akte kematian		30%	Perubahan indikator	Dinas Dukcapil
							Persentase dokumen/arsip		50%	Perubahan	Dinas Dukcapil

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							pendaftaran sipil yang dikelola			indikator	
						Pelayanan dan penataan administrasi pendaftaran penduduk	Persentase rata-rata kepemilikan akta pendaftaran penduduk	97%		Indikator dihapus	Dinas Dukcapil
							Cakupan Kepemilikan KTP-el		97%	Perubahan indikator	Dinas Dukcapil
							Cakupan kepemilikan KK		98%		Dinas Dukcapil
							Cakupan Kepemilikan KIA		5%		Dinas Dukcapil
							Persentase pendataan penduduk pindah datang		3%		Dinas Dukcapil
						Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase database kependudukan yang valid dan update	20%		Indikator dihapus	Dinas Dukcapil
							Persentase database kependudukan dengan data SIAK Pelayanan		75%	Perubahan indikator	Dinas Dukcapil
						Pengelolaan pemanfaatan data dan peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan	Persentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	85%	44%	Turun	Dinas Dukcapil
							Persentase inovasi yang dilaksanakan		80%	Perubahan	Dinas Dukcapil

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
										Indikator	
						Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100	100	Tetap	Satpol PP
							Persentase anggota Satpol PP Kabupaten Banjar yang telah mengikuti Diklat Dasar Satpol PP			Indikator dihapus	Satpol PP
						Penegakan peraturan daerah	Persentase perda yang ditegakkan			Indikator dihapus	Satpol PP
							Persentase penyelesaian peraturan perundang undangan daerah		100	Perubahan indikator	Satpol PP
						Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan	Rasio jumlah satuan linmas per RT			Indikator dihapus	Satpol PP
						Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio jumlah satuan linmas per RT	1:1 Rasio	1:1 Rasio	tetap	Satpol PP

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Penyelesaian permasalahan pertanahan	Persentase konflik tanah yang difasilitasi	100 %		Indikator dihapus	Dinas Pertanahan
							Persentase pelaksanaan fasilitasi pengaduan sengketa tanah		100%	Perubahan indikator	Dinas Pertanahan
						Penatausahaan pertanahan	Persentase aset tanah pemkab yang tersertifikasi	100 %	17,69 %	Turun	Dinas Pertanahan
						Pengaturan bidang pertanahan	Persentase tanah ulayat dan tanah kosong yang memiliki payung hukum	100 %		Indikator dihapus	Dinas Pertanahan
							Persentase pelaksanaan penyusunan Raperda		100%	Penambahan indikator	Dinas Pertanahan
						Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100 %		Indikator dihapus	RSUD
							Persentase Pelayanan BLUD yang terpenuhi		80%	Perubahan indikator	RSUD
						Peningkatan Pelayanan Medik	Persentase capaian indikator SPM IGD	10 org		Program	RSUD

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Persentase capaian indikator SPM IRNA	80%		Dihapus	RSUD
							Persentase capaian indikator SPM IRJA	80%			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM ICU/ICCU	1 org			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM Laboratorium	7 org			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM Radiologi	4 org			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM Farmasi	10 org			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM Gizi	8 org			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM Laundry	3 org			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM CSSD	1 org			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM Pemulasaran Jenazah	3 org			RSUD
						Program Peningkatan Pelayanan Keperawatan	Persentase capaian indikator SPM IGD	11 org		Program	RSUD
							Persentase Asuhan Keperawatan yang sesuai dengan SAK	5 dok		Dihapus	RSUD
							Persentase Indikator Mutu Keperawatan IGD	1 unit			RSUD

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Persentase capaian indikator SPM Instalasi Rawat Inap (IRNA)	39 org		Program Diharap	RSUD
							Persentase Asuhan Keperawatan yang sesuai dengan SAK	20 dok			RSUD
							Persentase Indikator Mutu Keperawatan IRNA	4 unit			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM IRJA	20 org			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM ICU/ICCU	8 org			RSUD
							Asuhan Keperawatan yang sesuai dengan SAK	11 Dok			RSUD
							Indikator Mutu Keperawatan unit perawatan ibu	2 unit			RSUD
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	terpenuhinya sarana dan prasarana Pendukung Pelayanan	25 Ruang			Program Diharap
						Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata sesuai standar RS type B		81%	Penambahan program,	RSUD

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Cakupan pemeliharaan alat kesehatan, sarana dan prasarana berdasarkan jenis pelayanan Rumah sakit		100%		RSUD
						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase SDM pelayanan kesehatan berdasarkan kualifikasi		80%		RSUD
						Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	IKM pelayanan perijinan		80%		Dinas PMPTPS
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Opini BPK	WTP	WTP		Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP	100	100		Dinas BPKAD
						Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	100 %	100%		Dinas BPKAD
							Persentase perangkat daerah yang telah menyusun laporan keuangan sesuai standar	100 %		Indikator dihapus	Dinas BPKAD
						Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	100 %	100%		Dinas BPKAD
						Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perangkat daerah yang telah	100 %	100%		Dinas BPKAD

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							menyusun LKj sesuai Ketentuan				
						Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah	Persentase Aset Daerah yang Bernilai Wajar dan Baik	100 %		Indikator dihapus	Dinas BPKAD
							Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara baik		85%	Perubahan indikator	Dinas BPKAD
							Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		100%	Indikator	Dinas BPKAD
		Peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	11,25		Dihapus, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah	Persentase Kepatuhan Membayar Pajak Daerah	90	90		Bapenda
		Jumlah pendapatan asli daerah (Rp.)		185 M	ditambah	Pencapaian Target Retribusi Daerah	Persentase SKPD Pemungut yang Mencapai Target Retribusi Daerah	100	70	turun	Bapenda
						Program akurasi data Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase Data Pajak Bumi dan Bangunan yang Akurat	100		Indikator dihapus	Bapenda

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Persentase capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan		100	Perubahan indikator	Bapenda
						Program Pencapaian Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Persentase Capaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90		dihapus	Bapenda
						Program Penyusunan Zona Nilai Tanah	Persentase Peraturan Zona Nilai Tanah yang Diterbitkan	100		Dihapus	Bapenda
						Program pemutakhiran data BPHTB	Persentase capaian penerimaan BPHTB		100	Penambahan indikator	Bapenda
						Program sinkronisasi data pendapatan daerah	Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron		95%		Bapenda
		Nilai/Skor EKPPD	3,19	3,18	Penyesuaian target	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Persentase rata-rata capaian indikator kinerja kunci (IKK) daerah	100		Indikator dihapus	Setda
							Rata-rata IKM Kecamatan		82%	Perubahan indikator	Setda
							Terisian data IKK		100%		Setda
						Kerja sama pembangunan	Persentase Kerja sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	100	100		Setda
						Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase Permasalahan Segmen	42,25		dihapus	Setda

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Batas Wilayah Yang Diselesaikan				
						Program penegasan batas daerah	Persentase permasalahan segmen batas wilayah yang diselesaikan		42,25 %		Setda
						Penataan peraturan perundang-undangan	Persentase Peraturan Yang Diterbitkan	100			Setda
							Persentase Dokumen Peraturan Perundang-undangan Yang Dipublikasikan	100	100		Setda
							Persentase peraturan yang disahkan		100	Perubahan indikator	Setda
							Persentase terfasilitasi permasalahan hukum yang tertangani		100	Perubahan indikator	Setda
						Peningkatan pelayanan kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Kebijakan Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan	100		Indikator dihapus	Setda
							Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WKDH		100%	Perubahan indikator	Setda
							Persentase pelayanan keprotokolan dan		90%	Indikator	Setda

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							kehumasan atas kegiatan pemerintah daerah			Penambahan program, menyesuaikan Perubahan RPJMD	
							Persentase Pelayanan Kantor Perwakilan terhadap KDH/WKDH/Ketua DPRD		100%		Setda
						Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan pembinaan kelembagaan	Persentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi		100%		Setda
						Program koordinasi dan fasilitasi perekonomian dan investasi daerah	Persentase BUMD yang sehat		100%		Setda
						.	Persentase kebijakan lingkup urusan perekonomian yang terlaksana		100%		Setda
						Program penunjang penyelenggaraan hari-hari besar	Persentase hari-hari besar nasional yang diperingati		100%		Setda
						Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Anggaran (Persentase penyelesaian dokumen anggaran (KUA PPAS, APBD dan PAPBD) tepat waktu		100%		Setda DPRD
						.	Pengawasan (Persentase pembahasan		100%		Setda DPRD

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							pertanggungjawaban (LKPJ dan LKD) tepat waktu				
						Fasilitasi kinerja fungsi legislasi	Persentase fasilitasi pembahasan laporan daerah			dihapus	Setda DPRD
						Fasilitasi kinerja fungsi anggaran	Persentase fasilitasi dokumen anggaran tepat waktu			Dihapus	Setda DPRD
						Fasilitasi kinerja fungsi pengawasan	Persentase fasilitasi pertanggungjawaban kepala daerah tepat waktu			Dihapus	Setda DPRD
Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial	Persentase penurunan PMKS	20	1,91	Penurunan target	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin Mendapat Pelayanan Sosial	211 Jiwa		Dihapus	Dinas Sosial
						Program panti asuhan/panti jompo	Persentase anak terlantar dalam panti yang terbina		29,41	Penambahan	Dinas Sosial
						Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase Keluarga miskin (PKH) yang mendapatkan bantuan		100	program menyesuaikan perubahan	Dinas Sosial
						Program pembinaan para penyandang cacat & trauma	Persentase Para Penyandang Cacat dan Trauma yang		28,63		Dinas Sosial

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKP D 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							mendapatkan pembinaan			han RPJMD	
						Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani		34,63		Dinas Sosial
						Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial		50%		Dinas Sosial
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		75	Perubahan indikator						Dinas PPKBP3A
		Persentase kelompok Perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi			Indikator dihapus	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kelompok perempuan dalam usaha ekonomi terbina	60%		Dihapus	Dinas PPKBP3A
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap			Indikator dihapus		Persentase Cakupan kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	85		Dihapus	Dinas PPKBP3A

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKP D 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKP D 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
		perempuan dan anak									
						Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan Pengarusutamaan gender	Persentase kelompok perempuan dalam usaha ekonomi terbina		15	Penambahan program	Dinas PPKBP3A
						Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kasus anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	85		dihapus	Dinas PPKBP3A
						Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi		85%	Penambahan program	Dinas PPKBP3A
							Kategori kabupaten layak anak		Madya = 1		Dinas PPKBP3A
		Skor Kabupaten layak anak			Indikator dihapus	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga yang aktif	90		Dihapus	Dinas PPKBP3A

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi khususnya pada kerangka pendanaan, maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2019, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana prioritas daerah sekaligus pelaksanaan urusan kewenangan Tahun 2019 disajikan pada lampiran 2 buku II RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2019. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjar

Rekapitulasi Perubahan program/kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana tabel 5.1 dan 5.2 berikut :

Tabel 5. 1. Rekapitulasi perubahan Program dan kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2019

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU
		RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5-3
1	Pendidikan	10	9	9	92	79	77	149.261.087.800	130.369.068.446	134.207.853.646	0
2	Kesehatan	24	20	20	107	82	79	227.498.222.290	194.571.988.536	194.128.485.205	0
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	31	31	31	104	100	100	158.180.137.000	216.849.132.588	221.798.733.888	0
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	11	11	11	58	44	43	39.877.285.600	20.895.023.900	20.895.023.900	0
5	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	24	25	25	84	91	92	22.922.818.930	17.980.403.473	17.920.863.473	1
6	Sosial	9	9	9	39	37	38	5.934.039.805	5.393.950.564	6.158.343.264	0

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU
		RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5-3
7	Tenaga Kerja	6	6	6	26	31	31	4.212.513.280	2.647.570.632	2.961.076.712	0
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6	6	6	30	32	32	4.549.516.000	4.128.744.376	4.128.744.376	0
9	Pangan	4	4	4	38	39	39	4.646.450.000	3.289.720.612	3.539.320.612	0
10	Pertanahan	7	7	7	26	27	27	5.953.994.000	3.738.617.532	3.738.617.532	0
11	Lingkungan Hidup	15	15	15	72	59	59	54.358.296.120	26.819.190.020	26.819.190.020	0
12	Administrasi Kependudukan Dan Capil	7	8	8	39	35	35	9.969.769.687	7.545.791.140	7.545.791.140	0
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	8	8	8	58	59	59	6433466080	6.047.673.840	6.047.673.840	0

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU
		RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5-3
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2	2	2	5	7	7	1.898.565.000	5.661.904.000	5.661.904.000	0
15	Perhubungan	11	11	11	57	55	55	17.656.000.503	7.249.207.364	7.249.207.364	0
16	Komunikasi Dan Informatika	6	7	7	24	30	30	23.502.215.000	14.225.232.448	14.225.232.448	0
17	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	9	9	9	44	43	43	4.904.861.853	3.418.978.228	3.418.978.228	0
18	Penanaman Modal	5	6	6	25	30	30	3.326.769.000	3.434.817.756	3.434.817.756	0
19	Kepemudaan Dan Olah Raga	8	8	8	35	32	32	36.051.718.238	5.272.162.118	5.272.162.118	0

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU
		RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5-3
20	Statistik	1	1	1	2	2	2	879.900.000	545.400.000	545.400.000	0
21	Kebudayaan	8	8	8	24	29	29	5.510.487.500	4.354.107.816	4.354.107.816	0
22	Perpustakaan	4	4	4	29	19	19	2.480.340.800	3.643.017.250	3.643.017.250	0
23	Kearsipan	4	4	4	9	10	10	519.840.000	646.630.000	646.630.000	0
24	Kelautan Dan Perikanan	8	8	8	30	30	33	3.567.359.608	3.567.359.608	4.347.071.008	0
25	Pariwisata	3	3	3	8	14	14	5.930.410.750	4.982.928.200	4.982.928.200	0
26	Pertanian	19	19	19	66	78	79	27.891.920.920	20.327.483.584	20.593.583.584	0
28	Perdagangan	6	6	6	13	12	12	5.687.650.000	5.596.648.500	5.936.648.500	0

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU
		RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5-3
29	Perindustrian	7	7	7	32	34	34	5.281.807.500	5.726.600.256	6.523.600.256	0
31	Administrasi Pemerintahan	44	44	44	126	148	149	103.303.954.420	102.129.381.972	120.689.742.644	0
32	Pengawasan		7	7	25	27	27	6.149.654.290	6.026.925.978	6.026.925.978	0
33	Perencanaan	1	11	11	76	75	75	13.894.307.960	12.579.688.436	12.986.039.580	0
34	Keuangan		18	18	84	90	90	20.789.198.259	20.937.723.708	20.937.723.708	0

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU
		RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5-3
35	Kepegawaian		12	12	62	55	55	9.578.179.800	5.849.211.176	5.849.211.176	0
JUMLAH			354	354	1549	1535	1536	992.602.737.993	876.452.284.057	907.214.649.222	1

Tabel 5. 2. Rekapitulasi Perubahan Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah

No.	Prioritas Daerah	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Pagu	
		RKPD 2019	Rankhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Rankhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Rankhir RKPD 2019 Perubahan
1	Penerapan Nilai-Nilai Agama	10	10	31	31	20.142.568.072	20.142.568.072

2	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan	6	6	68	67	118.249.314.262	121.259.264.262
3	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan	17	17	74	74	44.954.982.262	68.430.203.075
4	Peningkatan Kesempatan Kerja	3	3	8	8	1.133.634.560	1.422.885.840
5	Peningkatan Ekonomi Daerah	41	41	148	151	48.609.757.500	50.451.819.960
6	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	13	13	52	52	21.893.723.200	21.601.433.200
7	Penataan Infrastruktur Daerah	43	43	139	138	239.029.177.450	243.416.401.970
8	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Desa	62	62	275	272	248.962.448.812	235.382.604.004
9	Perlindungan Sosial Masyarakat	7	7	24	24	4.335.182.984	4.814.013.984

BAB 6 PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka pendanaan, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun keempat melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2019 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Tahun 2019 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
2. Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/ kegiatan.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap kepala SKPD wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/ kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan pengendalian SKPD, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati Banjar c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
6. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati Banjar c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
7. Pada akhir Tahun Anggaran 2019, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan/ kegiatan Tahun 2019.

Bupati Banjar,

ttd

H. KHALILURRAHMAN